

DAFTAR PUSTAKA

- Andam, Z. R. (2003). *E-commerce and e-business*. Malaysia: UNDP-APDIP.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik e-commerce 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2020). *Profil kependudukan kabupaten Purworejo tahun 2020*. Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2022). *Kabupaten Purworejo dalam angka 2022*. Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut kabupaten/kota dan tujuan mengakses internet*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan tahunan bank Indonesia 2021*. Jakarta.
- Cahyadi, A., & Oka Margana, I. (2018). Kebijakan optimasi pajak penghasilan dalam kegiatan e-commerce. *Veritas et Justitia*, 4(2), 358–387.
<https://doi.org/10.25123/vej.3071>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-commerce*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

- Fajarwati, R. , S. E. , Y. , & W. (2021). Analisis pengenaan pajak penghasilan atas usaha mikro kecil menengah yang menjalankan transaksi e-commerce di kabupaten Kediri. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1(No 1), 1–15.
- Fitriandi, P. (2020). Pemajakan atas transaksi melalui online marketplace. *Jurnal Pajak Indonesia*, 14–20.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Informasi APBN 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. (n.d.). *Peta Purworejo*. Diakses pada 11 Mei 2022, dari <https://purworejokab.go.id/web/peta-purworejo.html>.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat negara.

- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riphat, S. (2021). *Pajak e-commerce*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rosalinawati, E. , & S. (2018). Analisis pajak penghasilan atas transaksi e-commerce di kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 1–18.
- Sakti, N. W. (2014). *Buku pintar pajak e-commerce dari mendaftar sampai membayar*. Jakarta: Visi Media.
- Sari, A. Y. (2018). *Analisis terhadap penerapan pajak atas transaksi e-commerce*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Setiabudi, A. A. (2020). *Tinjauan atas penerapan pajak penghasilan kepada pedagang online media sosial dan online marketplace*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung: PT Alfabet.
- Suyanto, M. (2003). *Strategi periklanan pada e-commerce perusahaan top dunia*. Yogyakarta: Andi.